

UPAYA DAYA SAING UMKM LOKAL TERHADAP E-PROCUREMENT DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2015

Aulia Nur Kasiwi

aulianurkasiwi@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan upaya UMKM terhadap penggunaan *e-procurement* di Provinsi Riau Tahun 2011-2015 dalam rangka untuk merumuskan solusi untuk pengembangan UMKM. UMKM ini dianggap sebagai salah satu wadah dan juga mempunyai dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah serta mampu mengembangkan lapangan pekerjaan. Namun, UMKM di Provinsi Riau perkembangan yang terjadi belum merata pada seluruh daerah di Provinsi Riau yang juga disebabkan dengan faktor keberadaan sumber daya yang ada di 6 daerah di Provinsi Riau yang rendah dibandingkan dengan 6 daerah lainnya yang telah mampu berkembang.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan pada metodologi penelitian kualitatif. Unit analisa pada penelitian ini adalah LPSE Provinsi Riau, Dinas Koperasi dan UMKM, Asosiasi UMKM dan UMKM. Data primer yang didapat pada penelitian ini berasal dari hasil olah wawancara dengan 6 UMKM yang mengikuti *e-procurement* di Provinsi Riau secara berturut-turut pada tahun 2011-2015, pihak LPSE Provinsi Riau dan juga Asosiasi UMKM di Provinsi Riau. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu diambil dari literature review dan juga olah data yang berasal dari website LPSE Provinsi Riau pada tahun 2011-2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di Provinsi Riau mempunyai upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing, diantaranya dari aspek biaya, waktu, kualitas dan fleksibilitas serta UMKM di Provinsi Riau mendapatkan fasilitasi dari Asosiasi UMKM dengan adanya Klinik UMKM. Hal tersebut diperuntukan agar seluruh UMKM yang ada di Provinsi Riau dapat terus maju dan mengembangkan usaha yang dimiliki. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan beberapa Bank untuk memberikan agunan atau KUR kepada UMKM yang sudah mempunyai Legalitas agar tetap dapat memajukan usaha yang dimiliki. Adapun dari LPSE Provinsi Riau akan merilis *e-catalog* local agar memudahkan para pelaku usaha meningkatkan ekonomi kecil kerakyatan. Asosiasi UMKM di Provinsi Riau juga telah melakukan upaya diantaranya memberikan wadah Klinik UMKM untuk media konsultasi UMKM yang memiliki hambatan pada usaha yang dimiliki.

Kata kunci : Daya Saing, UMKM, LPSE Provinsi Riau, Asosiasi UMKM.

LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa *E-Procurement* ini sistem pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem elektronik dengan cara lelang yang dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan yang mempunyai produk atau jasa yang dibutuhkan. Pelaksanaannya tidak dengan melalui tatap muka tetapi dilakukan melalui internet. Indonesia menjalankan sistem ini agar mengurangi maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dibuat berdasarkan banyaknya peluang penyimpangan yang dilaksanakan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Maka dengan adanya kebijakan ini akan mampu meminimalisir terjadinya tindakan korupsi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan adanya *e-procurement*, celah dalam tindakan yang cenderung menyimpang akan lebih diminimalisir dan kegiatan pengadaan yang dilakukan akan lebih transparan, lebih hemat waktu dan serta lebih mudah dalam melakukan pertanggung jawaban keuangan.

LPSE Riau dalam periode tahun 2011-2015 telah mengadakan pelelangan pengadaan barang/jasa mencapai 3726 jenis lelang yang sudah dilakukan melalui *e-procurement*. Peserta yang mengikuti kegiatan dalam hal ini pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di LPSE Provinsi Riau tidak hanya berasal dari dalam wilayah Provinsi Riau saja tetapi peserta yang mengikuti kegiatan dalam hal ini pengadaan barang/jasa juga berasal dari luar wilayah provinsi Riau. Dimana dalam hal ini siapa yang dirasa memiliki kualitas dan kuantitas yang baik dalam pengadaan itu yang menjadi menjadi pemilik tender yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Wilayah-wilayah luar daerah yang menjadi pemenang pelelangan (*tender*) ini diantaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI dan Bali (Riau, 2016).

Pada pelaksanaan *e-procurement*, adapun aktor yang terlibat pada kegiatan ini diantaranya adalah swakelola, perusahaan dan juga UMKM. Pada kasus yang terjadi pada pelelangan yang dilakukan LPSE Provinsi Riau ini mempunyai perhatian menarik terhadap UMKM karena ada beberapa UMKM yang terlibat dalam pelelangan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun, baik pelelangan jenis pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa konsultasi. Dalam kaitannya, peran pada UMKM lokal ini mempunyai pengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat lokal baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh masing-masing UMKM. Tidak banyak UMKM yang mengikuti pelelangan tersebut tetapi ada beberapa faktor yang perlu diketahui upaya-upaya UMKM tersebut untuk mampu berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang disediakan oleh LPSE provinsi Riau.

Pada Tahun 2010 Provinsi Riau mengalami lemahnya pemberian KUR yang mengakibatkan lemahnya perekonomian kerakyatan di Provinsi Riau dan mendorong pemerintah provinsi untuk membuat kebijakan dalam memberikan agunan kepada UMKM. Pada tahun 2012 pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan Bank untuk dapat memberikan bantuan KUR kepada usaha perekonomian kerakyatan. Beberapa bank yang terlibat kerjasama diantaranya seperti Bank Riau, Bank Nagari, BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, BSM dan BNI Syariah (Rustam, 2012).

Dengan temuan tersebut maka dapat diketahui tingkat daya saing dan partisipasi UMKM Lokal terhadap pengadaan barang/jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Dalam penerapan dan pelaksanaan *e-procurement* ini mempunyai dampak bagi perekonomian serta pendapatan daerah maupun masyarakat atau memunculkan suatu problematika baru bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi. Maka penelitian ini membahas beberapa hal yang diantaranya terkait dengan upaya yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Riau sebagai pelaksana barang/jasa pemerintah. Meskipun dalam hal ini lebih fokus kepada daya saing UMKM dalam mengikuti *e-procurement*.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui keterlibatan UMKM pada pelelangan yang diadakan oleh LPSE Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui tingkat daya saing UMKM Lokal dalam mengikuti *e-procurement* di Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan setiap individu yang ada di UMKM dalam meningkatkan kemampuannya pada keterlibatan *e-procurement*.

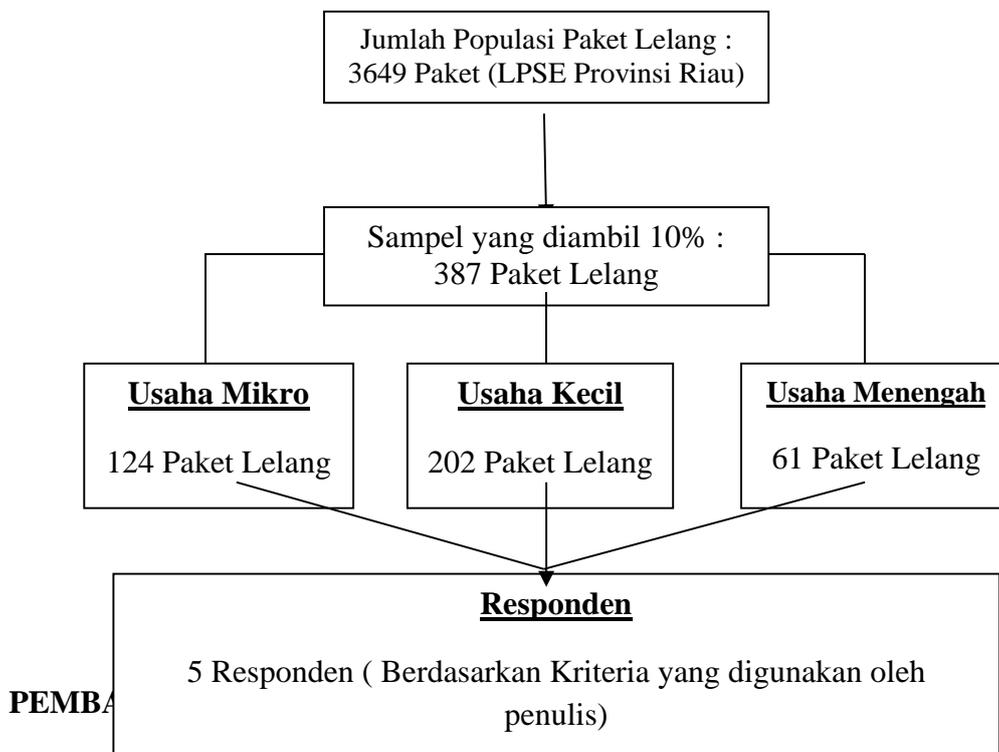
METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan peneliti adalah penelitian Kualitatif yakni penelitian yang menekankan pada pendeskripsian sebuah obyek masalah yang diteliti (Sugiono, 2012). Unit analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah LPSE Provinsi Riau. yang beralamatkan <http://lpse.riau.go.id/eproc/> . Kedua berasal dari Pihak Dinas Koperasi dan UMKM untuk *crosscheck* data yang ada sebagai penguat data yang diperoleh. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diambil dari literature review dan hasil wawancara. Dalam teknik yang pertama ini dilakukan suatu analisis dari pemilahan data yang akan di analisis. Saat penelitian dimulai, peneliti akan melakukan olah data yang sudah ada pada website LPSE Provinsi Riau pada tahun 2011-2015. Data yang sudah ada dikemas dan di urutkan berdasarkan kategori yang ada untuk dapat diolah. Jika semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisasikan (Gay dan Diehl, 1992). Penelitian ini bersifat deskriptif, maka sampel yang diambil dari populasi sebesar 10% (Gay dan Diehl, 1992). Proses pengambilan sampel ini menggunakan teknik *Purposive sampling* yang merupakan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel adalah :

- a. Berasal dari UMKM
- b. Telah mengikuti Paket Lelang di LPSE Provinsi Riau Tahun 2011-2015

- c. Usaha Mikro dengan nilai pekerjaan kurang dari Rp. 300 juta.
- d. Usaha Kecil dengan nilai pekerjaan kurang dari Rp. 2,5 Milyar.
- e. Menjadi pemenang paket lelang selama periode tahun 2011-2015 minimum 2 kali pelaksanaan
- f. Berkenan untuk dijadikan responden

Bagan 1.1 Pengambilan Sampel Penelitian



Berdasarkan hasil olah data berupa data jumlah pemenang pelelangan tahun 2011-2015 dari jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi badan usaha maupun jasa lainnya dan juga data sekunder maupun hasil wawancara pada penelitian ini, bahwa adapun beberapa informasi yang ditemukan diantaranya adalah :

- a. Setiap tahun tingkat signifikansi UMKM di Provinsi Riau sudah dikatakan cukup baik bahwasannya setiap tahun mengalami

peningkatan 2,9% secara keseluruhan. Meskipun tidak semua dari UMKM tersebut berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau selalu mengalami peningkatan ekonomi.

- b. Asosiasi UMKM Provinsi Riau telah menyediakan wadah bagi UMKM di Provinsi Riau agar dapat berpartisipasi dan berbagi ilmu supaya meningkatkan daya saing baik dari UMKM itu sendiri maupun bagi Pemerintah Provinsi maupun Daerah dengan diadakannya Klinik UMKM dan Klinik UKM.
- c. LPSE Provinsi Riau akan merilis *e-catalog* agar mempermudah pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini agar harga jual yang mereka miliki masuk dalam sistem *e-catalog* sehingga perusahaan lokal tidak kesulitan untuk mendaftar di LKPP. Maka ini akan memunculkan daya saing yang ranahnya akan lebih maju.
- d. Berdasarkan temuan dari Asosiasi UMKM di Provinsi Riau adanya kesulitan berada pada akses biaya yang tentunya berkaitan dengan Bank pemberi KUR berdasarkan apa yang dilakukan oleh UMKM. Pada tahun 2011 baru dioptimalkan penyaluran KUR di Riau karena UMKM pada tahun sebelumnya merasa kesulitan dalam mengelola usaha yang dimiliki.
- e. Berdasarkan hasil olahan data pemenang pelelangan *e-procurement* di LPSE Riau adapun 6 perusahaan UMKM yang menjadi pemenang pelelangan baik dalam pengadaan barang, pengadaan konstruksi, dan jasa konsultasi badan usaha di tahun 2011-2015 yang dijadikan responden pada penelitian ini.
- f. Pemerintah provinsi dalam hal ini ditangani oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau selaku pemegang kendali urusannya dalam koperasi maupun UMKM merasa terdukung dengan adanya inisiatif LPSE sebagai wadah untuk memberikan pekerjaan melalui

pelelangan pengadaan barang/jasa secara konvensional maupun *e-procurement* dan juga dibantu dengan Asosiasi UMKM yang mendorong terwujudnya UMKM yang mampu mengembangkan usahanya.

Tabel 3.2.2 Daftar UMKM yang Mengikuti pelelangan berturut-turut pada tahun 2011-2015

No	Kab/Kota	UMKM	Kisaran Nilai Pekerjaan	Tahun Pemenangan	Keterangan
1	Indragiri Hilir	CV Aditya Ramadhan	Rp.300 juta - Rp. 2,5 Milyar	2013,2014,2015	Pekerjaan Konstruksi
2	Kampar	CV Surya Gemilang Sejati	Rp. 300 juta - Rp. 2,5 Milyar	2012,2013,2014,2015	Pengadaan Barang
3	Kabupaten Bengkalis	CV Kurnia Jaya Abadi	Rp. 300 juta - Rp. 2,5 Milyar	2013 ,2015	Pengadaan Barang
4	Kota Pekanbaru	CV Rena Wijaya	Rp.300 juta	2012,2014,2015	Jasa Konsultasi Badan Usaha
5	Rokan Hulu	CV Rokan Hulu	Rp.300 juta	2012,2013,2014,2015	Pekerjaan Konstruksi
6	Dumai	CV Bahari Riau Pesisir	Rp. 300 juta - Rp. 2,5 Milyar	2011,2013	Pengadaan Barang

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait dengan upaya apa saja yang dilakukan oleh UMKM Lokal yang berada di Provinsi Riau dalam mengikuti *e-procurement* pada tahun 2011-2015 yaitu telah di paparkan pada bab sebelumnya terkait dengan temuan dan analisis. Adapun kesimpulan dari rumusan masalah tersebut adalah dalam paket lelang melalui *e-procurement* ini, nilai pekerjaan bagi UMKM yang disediakan oleh LPSE Provinsi Riau yaitu nilai pekerjaan dari Rp. 50 juta – Rp. 100 Milyar, baik dalam penyedia barang/jasa tersebut berasal dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, yang nantinya hal ini akan menguntungkan pelaku usaha dengan mengikuti *e-procurement*. Dibawah nilai pekerjaan kurang dari Rp. 50 juta akan mengikuti pelelangan secara konvensional (Raja, 2016).

Penggunaan teknologi informasi dengan adanya aplikasi dari LPSE ini memberikan dampak baik bagi kemajuan dan daya saing UMKM di Provinsi Riau dengan menekankan pada efisiensi serta efektifitas dalam penggunaannya sistem elektronik tersebut menjadi cukup baik, yang akan menghindari dari kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi dilapangan. Misalnya, adanya unsur lobbying, kecurangan dalam data dan manipulasi yang bisa saja terjadi, agar hal ini akan memberi keadilan bagi seluruh peserta lelang baik peserta dari penyedia barang/jasa dengan kualifikasi kecil atau besar. Maka hasil kesimpulan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Pada pengaruh biaya ini di tahun 2010 ditemui masalah dalam aspek biaya bahwa pelaku usaha masih kesulitan dalam mendapatkan KUR pada tahun 2010 sebelum dikeluarkannya Inpres Nomor: 3/2010 untuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka perluasan penyaluran KUR. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah provinsi membuat kebijakan untuk bekerjasama dengan bank dalam pemberian KUR. Maka pemerintah Provinsi melakukan adanya pengoptimalisasian penyaluran KUR di Provinsi Riau pada tahun 2012. Ditahun 2012 penyaluran KUR ini tidak terlepas dari dukungan bank pelaksana KUR yang telah ditunjuk pemerintah diantaranya

yaitu Bank Riau, Bank Nagari, BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, BSM dan BNI Syariah (Rustam, 2012). Produk KUR ini yang telah menjadi solusi finansial yang tepat dan mengena bagi keterbatasan UMKM dalam mengakses Kredit dari perbankan di Riau.

2. Lalu masalah yang ditemui LPSE Provinsi Riau yang kedua adalah melihat adanya kesulitan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini dalam memasarkan harga barang yang mereka miliki, oleh sebab itu LPSE Provinsi Riau dengan mempertimbangkan hal tersebut, merilis *e-catalog* agar mempermudah pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini agar harga jual yang mereka miliki masuk dalam sistem *e-catalog* sehingga perusahaan lokal tidak kesulitan untuk mendaftarkan pada LKPP di Jakarta.
3. UMKM ini terbantu oleh adanya asosiasi UMKM yang telah menyediakan wadah klinik UMKM untuk dapat berkonsultasi dan berbagi pengetahuan pada masing-masing UMKM, tetapi juga dapat melihat pengaruh dan keterlibatan UMKM ini terhadap penggunaan *e-procurement* yang juga bukan hanya dibidang pangan dan perdagangan saja, tetapi dalam pengadaan barang dan jasa yang disediakan oleh LPSE pun, UMKM dapat terlibat didalam pekerjaan tersebut.
4. Dengan adanya kejadian seperti itu, pemerintah provinsi berkeinginan untuk dapat memfasilitasi UMKM agar tetap dapat mandiri dan berdaya saing (Mustofa, 2016). Tentunya juga ini akan memudahkan keterlibatan beberapa instansi yang menggunakan jasa maupun layanan dari UMKM di Provinsi Riau (Rustam, 2012). Diketahui bahwa salah satu kesulitan UMKM yaitu pada kemampuan UMKM untuk menyediakan agunan. Padahal jika dilihat sisi strategisnya, peran UMKM ini dalam membantu perekonomian daerah sangat besar, karena dapat menyerap banyak tenaga kerja. Bentuk ini merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi Riau, dalam

meningkatkan peran UMKM pada pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan yang diamanatkan pada Inpres Nomor: 3/2010 tentang program pembangunan berkeadilan untuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka perluasan penyaluran KUR serta pemberdayaan UMKM.

Maka ini akan memunculkan daya saing yang ranahnya akan lebih maju. Dengan adanya hal ini LPSE Provinsi Riau dirasa telah memberikan tempat yang sesuai untuk menunjukkan bahwa adanya dukungan ini pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Riau dalam mewujudkan daya saing mereka baik dalam ranah lokal maupun multinasional.

SARAN

Adapun yang menjadi saran pada penelitian ini adalah :

1. Pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri mereka setiap individunya dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).
2. Dapat membantu pihak diantaranya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LPSE dan Dinas Koperasi dan UMKM ini memenuhi atau mengupayakan masyarakat lokal yang menjadi pelaku usaha agar dapat berdaya saing baik secara lokal maupun multinasional.
3. Untuk memudahkan LPSE dalam memberikan pekerjaan perlu adanya pengalokasian nilai pekerjaan bagi UMKM maupun Usaha Besar agar adanya pemerataan bagi masyarakat.

REFERENSI

BUKU

- Astamoen, I. H. (2005). *Entrepreneurship*. Bandung: Alfabeta.
- G, K. P. (2001). *Prinsip Pemasaran, edisi kedelapan jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Gromang, F. (2003). *Management Kepariwisataaan. Terjemahan dari Tourism Management Karya Salah Wahab*. Jakarta: Karya Grafis Digital.
- Hariani, E.-E. (2013). *Penerapan Aplikasi E-Procurement di Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Manado Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. . Yogyakarta: Tesis Magister Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia*.
- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indrajit, R. (2001). *Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Elex Media Komputendo.
- Kotler, P. (2003). *Marketing Management Edisi 11*. New Jersey : Prentice Hall Int'l .
- Muhadi. (2007). *Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional Dalam Mempengaruhi Kinerja Karyawan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muhammad, B. H. (2008). *Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Porter, M. (2013). *Porter Five Forces*. Management & Marketing.
- Porter, M. E. (2007). *Strategi Bersaing (Competitive Strategy)*. Tangerang: Kharisma Publishing Group.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sunarto. (2004). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Yogyakarta: Amus.

Wijaya, W. H. (2013). *Studi Penerapan E-Procurement pada Proses Pengadaan Barang di Pemerintah Kota Surabaya*. Surabaya: Grahapustaka.

INTERNET

Anggar, R. W. (2013). *Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement Dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Surabaya*.

Retrieved Agustus 20, 2016, from

<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/25125079/its-master-17100-paper>

[pdf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475293800&Signature=A0YBMTZizETiEO0ShQmRdm7m91U%3D&response-content-](http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/25125079/its-master-17100-paper.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475293800&Signature=A0YBMTZizETiEO0ShQmRdm7m91U%3D&response-content-)

[disposition=inline%3B%20filename%3DSTUDI_PENERAPAN_E_PR](http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/25125079/its-master-17100-paper.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475293800&Signature=A0YBMTZizETiEO0ShQmRdm7m91U%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSTUDI_PENERAPAN_E_PR)

BPS. (2016). *Data Provinsi Riau*. Retrieved October 24, 2016, from www.riau.go.id: <https://www.riau.go.id/home/content/65/industri-perdagangan-lembaga-keuangan-koperasi-dan>

Budi Ramanda Bustami, P. H. (n.d.). *Analisis Daya Saing Produksi Ekspor Provinsi Sumatera Utara*. Retrieved August 23, 2016, from <http://202.0.107.5/index.php/edk/article/view/1489>

Emrizal. (2008, April). *Industrialisasi Berbasis UMKM Inovatif Untuk Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Retrieved September 1, 2016, from *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 3 No 1: <http://ojs.polinpdg.ac.id/index.php/JEB/article/download/272/273>

LPSE Provinsi Riau. (n.d.). Retrieved August 20, 2016, from lpse.riau.go.id: <http://lpse.riau.go.id/eproc/lelang?s=5>,

- Riau, L. P. (2016, Oktober). *LPSE Provinsi Riau*. Retrieved Oktober Selasa, 25, 2016, from www.lpse.riau.go.id: <http://lpse.riau.go.id/eproc/lelang?s=3>
- Rustam, B. R. (2012, mei 7). *riaupos*. Retrieved from www.riaupos.co: <http://www.riaupos.co/911-opini-optimalisasi-penyaluran-kur-di-riau.html#.WC-B0tAZvQI>
- Sudyana, D. (n.d.). *E-Procurement Pemerintah Provinsi Riau*. Retrieved Agustus 20, 2016, from www.academia.edu: https://www.academia.edu/14606672/EPROCUREMENT_PEMERINTAH_PROVINSI_RIAU
- Umum, D. (2013, 1 mei Rabu,). *Pemerintah Provinsi Riau*. Retrieved Oktober 5, 2016, from [riau.go.id](http://www.riau.go.id): <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>
- UNDP. (2013, januari). *Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik*. Retrieved agustus 18, 2016, from www.edukasippkn.com: <http://www.edukasippkn.com/2015/10/prinsip-prinsip-pemerintahan-yang-baik.html>.

JURNAL

- Ana Ranitania, A. F. (2013). Analisis Tata Kelola Proses Layanan Keamanan Informasi Penyedia Barang/Jasa Dalam Kegiatan E-Procurement Pada LPSE Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kerangka Kerja Cobit 5.
- Budidharma, G. H. (Maret 2013). Analysis Influence Of E-Procurement Against Good Governance In Kementerian Agama Republik Of Indonesia. Vol. IV No 1 Hal. 85-104.
- Budiningsih, T. S. (2010). Kebijakan Pemerintah Untuk Mendukung UMKM dan Koperasi dalam Menghadapi ACFTA. *INFOKOP Vol. 18*, Hal. 66-82.
- Drs. Asril, M. d. (2013). Strategi Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I*, Vol. 20 No. 1.

- Dwi Haryati, N. A. (2011). Pengadaan Barang/Jasa Secara ELEktronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Journal Government and Politic*, 237-429.
- Eugene W Anderson, C. F. (1994). Customer Satisfaction, Market Share and Profitability : Finding From Sweden. *Journal of Marketing Vol 58*, 53-66.
- Isjoni. (2003). Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Percepatan Peningkatan Ekonomi Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Industri dan Perkotaan* , Vol. VIII No 13.
- Mutiarin, D. (2014). Public Service Integrity Perception : Case Study In Kutai Kartanegara Regency, Indonesia. *Journal Government and Politics*, Vol. 5 No 1.
- Ndou, V. D. (2004). E- Government For Development Countries : Opportunities And Challenges. *The Elektronik Journal On Information Systems In Developing Countries*.
- Nurmandi, A. (2013). The Status Of Indonesia's E- Procurement. *Journal Government and Politic*, Vol 4 No 2.
- Nuryanti. (2013). Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Jurnal Ekonomi Vol 21 No 4 Desember 2013*, 2.
- Nuryanti. (2013). Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Jurnal Ekonomi* , Vol. 21 No 4.
- Raja Adro Satriawan Surya, K. d. (2015). Peningkatan Daya Saing Usaha UMKM Batik dan Tenun Riau Melalui Efisiensi Produksi. *Jurnal Pekbis Vol. 7 No 2*, Hal. 110-121.
- Totok Wahyu Abadi, d. (2014). Performance E-Government untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ifrastruktur di Kabupaten

Sidoarjo. *The Elektronik Journal On Information Systems In Developing Countries*, 225-330.

Udoyono, K. (2012). E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Journal Government and Politic* , Vol 5 No 1.

PERATURAN-PERATURAN

Dinas Koperasi, U. M. (2013). *Lakip tahun 2013*. Riau: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Kepala LKPP No 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Peraturan Kepala LKPP No 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara E-Tendering

PP No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

WAWANCARA

Husein. (2016, Oktober Kamis, 20). Daya Saing UMKM di Provinsi Riau. (Aulia, Interviewer)

Imam, I. (2016, November 1). Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Riau. (Aulia, Interviewer)

Juli. (2016, November Sabtu, 5). Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM terhadap e-Procurement di Provinsi Riau. (Aulia, Interviewer)

Mustofa. (2016, November 3). Asosiasi UKM di Provinsi Riau. (Aulia, Interviewer)

Raja. (2016, oktober Kamis, 13). Verifikator LPSE Provinsi Riau. (Aulia, Interviewer)